

MILIK PERPUSTAKAAN
UNISMUH MAKASSAR

SKRIPSI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN
DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN PANGAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN JENEPONTO



DIAN EKAWATI
105641110318

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN & PENERBITAN

Tgl. Terima	10-09-2022
Nomor Surat	-
Jumlah exp.	1 EXP
Harga	Sumb. Alumni
Nama buku	-
No. klasifikasi	R/0115/IPM/22 CD DIA i

PRODI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2022

SKRIPSI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN

DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN PANGAN MASYARAKAT

DI KABUPATEN JENEPONTO

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan

Memperoleh Gelar Sarja Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh

DIAN EKAWATI

105641110318

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Pengelolaan Cadangan Pangan
Dalam Memenuhi Kebutuhan Pangan Masyarakat Di
Kabuptane Jenepono

Nama Mahasiswa : Dian Ekawati

Stambuk : 105641110318

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

Pembimbing II



Ahmad Taufik, S.IP., M.AP

Mengetahui



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

NBM. 730 727

Ketua Program Studi



Ahmad Harakan, S.IP.,M.HI

NBM. 1207 163

HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 074/FPS/A.4-II/VIII/44/2022 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan yang dilaksanakan di Makassar pada hari Selasa tanggal 30 bulan Agustus tahun 2022

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

NBM: 730727

Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si

NBM: 992797

PENGUJI

1. **Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si**

()

2. **Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si**

()

3. **Hamrun, S.IP., M.Si.**

()

4. **Nur Khaerah, S.IP., M.IP**

()

ABSTRAK

Dian Ekawati, 2022. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Cadangan Pangan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Jeneponto

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan cadangan pangan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kabupaten Jeneponto. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif (menggambarkan) dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu tipe penelitian yang melakukan penggambaran mengenai situasi atau kejadian. Hal ini berdasarkan pada penelitian menghasilkan data-data berupa informasi dari informan apa adanya dan sesuai dengan penelitian.

Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder dengan jumlah informan 7 orang. Teknik pengumpulan dan pengelolaan data yang dilakukan dalam berbagai bentuk yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Triangulasi yang digunakan adalah triangulasi metode, triangulasi antar peneliti, triangulasi sumber data dan triangulasi teori.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan cadangan pangan yang diterapkan berdasarkan indikator adalah komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Dengan faktor pendukung adalah komunikasi dan sumber daya, dan faktor penghambat disposisi dan struktur birokrasi.

Kata kunci : Implementasi Kebijakan Pengelolaan, Pengelolaan Cadangan Pangan, Kesejahteraan Masyarakat.

KATA PENGANTAR

uji dan syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT. serta tak lupa pula sholawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Berkat Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan Skripsi dengan judul “Impelementasi Kebijakan Pengelolaan Cadangan Pangan Dalam Memenuhi Kebutuhan Pangan Masyarakat Di Kabupaten Jeneponto” ini dengan tepat waktu. terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari doa, bantuan, dukungan serta bimbingan dari beberapa pihak, sehingga saya sebagai penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada, yakni ;

1. Ketua jurusan Ilmu Pemerintahan, bapak Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I dan Ibu Nur Khaerah, S.IP.,M.IP atas arahan serta bimbingan dalam penulisan skripsi mahasiswa IP.
2. Dosen pembimbing penulisan skripsi, Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si dan Bapak Ahmad Taufik, S.IP., M.AP atas semua arahan, masukan, saran dan bimbingan yang diberikan selama penulisan Skripsi berlangsung hingga dapat selesai dengan baik, lancar dan tepat waktu.
3. Orang tua penulis, Ibu Sumarni dan Bapak Agus Salim yang telah memberikan dukungan, doa, nasihat serta fasilitas yang sangat luar bias, terima kasih atas doa, dukungan, semangat dan nasihat yang tiada henti diberikan kepada kehidupan penulis.
4. Kepala Dinas beserta staf Ketahanan Pangan, Ketua Bidang Distribusi & Harga Pangan, serta staf Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto,

untuk keramahan dan kesediaan memberikan bantuan selama proses penelitian dilakukan oleh penulis, dan juga

5. Dosen dan staf Ilmu Pemerintahan atas pengetahuan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis.
6. Teman-teman seperjuangan kuliah dan sahabat-sahabat penulis, yang selalu memberikan dukungan sehingga membuat penulis semangat dan tekun dalam menyusun skripsi ini, terima kasih untuk segala bentuk dukungannya.

Saya menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu, saran dan kritik dibutuhkan untuk perbaikan serta penyempurnaan pada skripsi ini sangat dibutuhkan oleh penulis. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan juga terkhusus bagi para pembaca pada umumnya.

Makassar, 29 Juni 2022

Dian Ekawati

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENERIMAAN TIM	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kajian Teori.....	13
1. Konsep Implementasi.....	13
2. Konsep Implementasi Kebijakan.....	14
3. Konsep Pengelolaan.....	15
4. Konsep Pangan.....	17
5. Konsep Cadangan Pangan.....	17
6. Konsep Masyarakat.....	18
7. Konsep Ketersediaan Pangan	19
C. Kerangka Berpikir.....	20
D. Fokus Penelitian.....	22
E. Deskripsi Fokus Penelitian.....	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	26
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	26
B. Jenis	26
C. Objek Penelitian	27
D. Jenis dan Sumber Data	28
E. Teknik Pengumpulan Data	29
1. Observasi	29
2. Wawancara.....	29
3. Dokumentasi	30
F. Teknik Analisis Data.....	30

1.	Reduksi data.....	31
2.	Tahap penyajian data.....	31
3.	Tahap penarikan kesimpulan.....	31
G.	Keabsahan Data.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		36
A.	Deskripsi Objek Penelitian.....	36
1.	Deskripsi Kabupaten Jeneponto.....	36
2.	Deskripsi Kantor Dinas Ketahanan Pangan.....	38
A.	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Cadangan Pangan Dalam Memenuhi Kebutuhan Pangan Masyarakat Di Kabupaten Jeneponto.....	40
1.	Komunikasi.....	41
2.	Sumber Daya.....	43
4.	Disposisi.....	47
4.	Struktur Birokrasi.....	50
5.	Kebijakan.....	54
6.	Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat.....	57
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		60
A.	Kesimpulan.....	60
B.	Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....		62
LAMPIRAN.....		64
RIWAYAT HIDUP.....		74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara geografis Kabupaten Jeneponto adalah sebuah daerah yang cukup potensial dalam pengembangan sektor pertanian khususnya tanaman padi jagung, dan sayuran (hortikultura). Hal tersebut dikarenakan sumber daya air yang mencukupi selain karena daerah ini juga merupakan kawasan pesisir pantai yang terletak di bagian selatan sehingga menambah keuntungan tersendiri bagi pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan ekonomi khususnya yang terkait dengan sektor ketahanan pangan. Oleh sebab itu, keuntungan yang dimiliki harus dioptimalkan agar di masa mendatang Kabupaten Jeneponto akan mampu bersaing dengan daerah lain dalam sektor pertanian, bahkan bukan hal yang mustahil apabila menjadi salah satu tumpuan dalam bidang pertanian di tingkat provinsi bahkan nasional.

Hal ini membutuhkan sebuah penanganan yang serius dan terencana, terpadu dan komprehensif dalam mendayagunakan seluruh potensi ekonomi khususnya sektor pertanian dengan maksud agar menciptakan kemandirian warga. Peran aktif pemerintah Kabupaten Jeneponto sangat diperlukan khususnya pada Dinas Pertanian sebagai penanggungjawab secara fungsional terkait program-program yang mampu mendorong ketahanan pangan. Salah satu peran pemerintah dalam rangka mendorong kemajuan dan kemandirian sektor pertanian adalah sebagai regulator dan dinamisator sehingga dapat meningkatkan peran aktif masyarakat pada setiap pelaksanaan program

pemerintah. Akan tetapi, harus pula didukung dengan strategi dan perencanaan yang matang sehingga setiap kegiatan yang dilakukan akan dapat mencapai hasil yang diinginkan. Strategi pemerintah inilah yang menjadi faktor penentu apakah sektor pertanian di seluruh kawasan Jeneponto akan dapat berkembang atau bahkan mengalami kemerosotan atau kemunduran (Sarneni Bs, 2019)

Pangan merupakan kebutuhan dasar yang paling esensial bagi manusia untuk mempertahankan hidup dan kehidupan. Pangan sebagai sumber gizi (karbohidrat, protein, vitamin, mineral dan air) menjadi landasan utama manusia untuk mencapai kesehatan dan kesejahteraan sepanjang siklus kehidupan. Sehingga pangan adalah kebutuhan yang tidak terlepas dari kehidupan manusia karena pangan merupakan hal yang sangat dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup dan melakukan semua aktivitas dalam kehidupannya. Pangan dalam hirarki kebutuhan manusia adalah salah satu kebutuhan yang paling mendasar sehingga pemenuhan pangan merupakan bagian dari hak asasi setiap orang. Pada masa lalu menunjukkan kekurangan pangan tidak hanya dapat berdampak negatif pada kondisi sosial ekonomi tetapi juga dapat menyebabkan instabilitas politik (Tedy Dirhamsyah, 2016).

Tantangan yang dihadapi Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar adalah bagaimana memenuhi kebutuhan umum mengenai ketahanan pangan adalah jumlah penduduk yang besar dengan pertumbuhan penduduk yang positif, yaitu jumlah penduduk semakin meningkat setiap tahunnya. Dengan demikian permintaan pangan masih akan meningkat. Peningkatan

pendapatan, kesadaran akan Kesehatan dan pergeseran pola makan karena pengaruh globalisasi, serta ragam aktivitas masyarakat juga menjadi pendorong terjadinya peningkatan permintaan pangan. Selain itu, sumber daya lahan yang tersedia semakin berkurang, karena tekanan penduduk serta persaingan pemanfaatan lahan antara sektor pangan dengan sektor non pangan. Secara spesifik, permasalahan sehubungan dengan ketahanan pangan adalah penyediaan, distribusi, dan konsumsi pangan (Yunastiti Purwaningsih, 2008).

Peningkatan ketahanan pangan masyarakat masih menghadapi berbagai masalah pada tingkat makro maupun mikro. Sisi makro, upaya pengelolaan ketahanan pangan masyarakat menghadapi tantangan utama pada peningkatan optimasi pemanfaatan sumberdaya lokal dan peningkatan kapasitas produksi pangan dalam keterbukaan ekonomi dan perdagangan global, agar produksi pangan domestik dapat tumbuh seiring dengan perkembangan pemenuhan kebutuhan pangan yang terus meningkat dalam jumlah, kualitas dan keberagamannya ditengah persaingan pasar internasional yang semakin terbuka. Sisi mikro, upaya pemantapan menghadapi tantangan utama dengan masih besarnya proporsi penduduk yang mengalami kerawanan pangan trasien karena bencana alam dan musibah serta kerawanan kronis karena kemiskinan (Tedy Dirhamsyah, 2016).

Dalam rangka memenuhi cadangan pangan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Jeneponto melalui Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah telah

berupaya meningkatkan Cadangan Pangan melalui pemberdayaan masyarakat untuk mengelola cadangan pangan masing-masing, mengelola petani organik dan membentuk koperasi sebagai naungan.

Berdasarkan uraian, maka diperlukan suatu penanganan yang terencana dan serius, komprehensif dan terpadu dalam mendayagunakan semua potensi ekonomi khususnya pada sektor ketahanan pangan maksud untuk menciptakan kemandirian masyarakat. Pemerintah Kabupaten Jeneponto harus berperan aktif khususnya pada Dinas Pertanian sebagai penanggungjawab secara fungsional terkait program-program yang mampu meningkatkan ketahanan pangan. Dalam rangka mendorong kemajuan dan kemandirian sektor pertanian salah satu peran pemerintah adakah sebagai dinamisor dan regulator sehingga dapat mendorong peran aktif masyarakat pada pelaksanaan program pemerintah. Namun, program tersebut juga harus didukung dengan adanya perencanaan dan strategi yang matang sehingga seluruh kegiatan yang dilaksanakan dapat mencapai hasil yang diinginkan (Dewi Swastika Ketut Sadra, 2011).

Salah satu upaya yang perlu ditempuh pemerintah dalam pembangunan ketahanan pangan adalah mengembangkan ketersediaan pangan pada setiap saat. Mengembangkan ketersediaan pangan dapat dilakukan dengan mengembangkan cadngan pangan. Cadangan Pangan Nasional menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 adalah persediaan pangan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangna,

gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat. Cadangan Pangan Nasional terdiri dari Cadangan Pangan Pemerintah, Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, dan Cadangan Pangan Masyarakat. Jika pada paragraph sebelumnya dijelaskan bahwa pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan atau pemerintah desa melaksanakan kebijakan dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan di wilayahnya masing-masing (Ni Made Ayu Sri Lestari, 2020).

Kabupaten Jeneponto sendiri memiliki potensi unggulan yakni sumber daya alam yang luas, seperti data yang dikemukakan oleh Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Jeneponto. Perlu adanya pengembangan lebih lanjut terkait dengan sumber daya alam yang sudah digali dan dikembangkan, sedang dan/atau belum dikembangkan, sektor pertanian yang bergantung pada potensi sumber daya alam menjadi mata pencaharian utama sebagian besar masyarakat Kabupaten Jeneponto. Kabupaten Jeneponto memiliki 11 Kecamatan dengan potensi sumber daya pangan yang berbeda beda. Penulis kemudian mengambil meneliti kedua daerah yang berbeda yaitu daerah Tarowang dan Rumbia. Daerah Tarowang sendiri memiliki sumber daya alam yang luas tetapi potensi sumber daya pangan yang kurang karena diakibatkan faktor cuaca atau musim kemarau, sehingga dalam setahun potensi untuk menghasilkan pangan maksimal hanya 2 kali panen. Sedangkan di daerah Rumbia memiliki potensi sumber daya alam yang baik dan menghasilkan panen yang banyak karena merupakan daerah yang subur dan memiliki tanah

yang sangat baik. Sehingga penulis meneliti kedua daerah tersebut untuk memperoleh data yang ingin diketahui.

Kecamatan Tarowang memiliki hasil panen yang sangat rendah dan mengalami penurunan dan kenaikan dengan jumlah yang sedikit dan tidak signifikan, sedangkan hasil panen Kecamatan Rumbia memiliki hasil panen tinggi dengan kenaikan jumlah yang lebih signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Tarowang merupakan lahan yang dikategorikan krisis pangan, sedangkan Kecamatan Rumbia lebih unggul. Hal ini karena faktor iklim dan juga didukung tanah yang subur.

Dalam mengelola cadangan pangan, kebijakan yang menjadi acuan Dinas Ketahanan Pangan adalah sesuai dengan kebijakan Peraturan Bupati No. 26 Tahun 2019 tentang pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah. Dalam kebijakan tersebut memiliki ruang lingkup besaran dana cadangan pangan, koordinasi pelaksanaan, mekanisme pengelolaan, mekanisme penyaluran, dan pelaporan. Sehingga penulis kemudian tertarik untuk meneliti hasil dari implementasi kebijakan pengelolaan cadangan pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan.

Tabel 2.1 Perkembangan Luas Panen, Produksi, dan Rata-Rata Produksi Padi Sawah di Kabupaten Jeneponto 2012-2016

Tahun	Luas Panen		Produksi		Rata-Rata Produksi	
	Hektar	Perkembangan (%)	Ton	Perkembangan (%)	Ku/Ha	Perkembangan (%)
2012	19.689	6,39	111.256	(5,94)	56,51	(11,59)

2013	22.075	12,12	119.772	(7,65)	54,26	(3,98)
2014	20.825	(5,66)	121.202	1,19	58,20	7,26
2015	20.344	(2,31)	96.285,5	(4,16)	49,61	(14,7)
2016	21.413,9	10,34	98,169	1,69	45,84	(7,59)

Luas panen dan produksi padi sawah selama satu tahun terakhir mengalami kenaikan, akan tetapi rata-rata produksi mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Rata-rata produksi untuk tanaman padi sawah pada tahun 2015 sebesar 49,61 kuintal/ha menjadi 45,84 kuintal/ha pada tahun 2016 atau sebesar 7,59 persen mengalami penurunan. Luas panen pada tahun 2015 adalah 20.344 Ha sedangkan tahun 2016 menjadi 21.413,9 Ha. Produksi padi sawah pada tahun 2015 sebesar 96.285,5 ton menjadi 98,168 ton gabah kering giling pada tahun 2016 pada tabel 2.1.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- Bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan cadangan pangan dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di Kabupaten Jeneponto ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan diatas, maka dapat dijabarkan tujuan penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pengelolaan Cadangan Pangan di Kabupaten Jeneponto.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi beberapa pihak antara lain :

a. Manfaat secara akademis

Secara akademis sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana (S-1) di jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar sehingga dapat memberikan kontribusi informasi yang berarti bagi perguruan tinggi.

b. Manfaat secara teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini agar bisa bermanfaat untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan referensi yang memaparkan keadaan fakta dilapangan terkait Implementasi Kebijakan Pengelolaan Cadangan Pangan di Kabupaten Jeneponto.

c. Manfaat secara praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini berguna sebagai rekomendasi dan bahan masukan bagi pemerintah khususnya Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto agar menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman bagi penulis mengenai implementasi kebijakan pengelolaan cadangan pangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan acuan penulis dalam melaksanakan penelitian, maka dari itu penulis memperoleh teori yang digunakan dalam kajian penelitian ini. Adapun peneliti terdahulu memiliki judul yang hampir sama dengan judul penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka akan sangat membantu dalam penyusunan skripsi. Adapun beberapa hasil penelitian terdahulu yang menjadi sumber literatur berupa jurnal yang terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Dwi Retno Irjayanti, 2018.	Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Melalui Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	Berdasarkan hasil penelitian terdahulu Indikator Kinerja dari sasaran nomor 1 yaitu terlaksananya identifikasi cadangan pangan pemerintah dan masyarakat salah satunya adalah penguatan cadangan pangan, pemerintah Kota Batu mengeluarkan Peraturan Walikota sehubungan dengan Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan

			Daerah yaitu Peraturan Walikota Batu nomor 16 Tahun 2017 tentang Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan..
2.	Tri Bayu Ramadhani, 2018.	Kebijakan Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat Dalam Mengelola Cadangan Pangan Daerah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan	Berdasarkan hasil penelitian terdahulu bahwa Kebijakan pengelolaan cadangan pangan daerah dilaksanakan untuk menggerakkan sektor-sektor strategis produksi dalam mewujudkan kedaulatan pangan yang pada akhirnya bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Kedaulatan pangan. Untuk mencapai cita-cita tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki Kebijakan Strategis Pembangunan Pangan dan Gizi 2015 – 2019 yang bermuara pada usaha pengelolaan cadangan pangan daerah. Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab terhadap pengelolaan cadangan pangan

			<p>daerah. Penguatan cadangan pangan sebagai antisipasi terhadap dampak anomali iklim yang semakin sulit diprediksi, seperti: terjadinya pergeseran masa tanam, masa pemanenan yang tidak merata sepanjang tahun, dan meningkatnya bencana yang tidak terduga (banjir, longsor, kekeringan, gempa) sehingga memerlukan sistem cadangan pangan yang kuat.</p>
3.	<p>Hasanatul Rahmi Dan Jumiati, 2020.</p>	<p>Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan (studi kasus pengelolaan cadangan</p>	<p>Hasil penelitian terdahulu ini menghasilkan bahwa Kepentingan kelompok sasaran dalam kebijakan ketahanan pangan ini adalah masyarakat petani yang tergabung dalam kelompok untuk mengelola cadangan pangan mereka sendiri. Dilihat dari isi kebijakan ketahanan pangan melalui program pengelolaan cadangan pangan masyarakat dijelaskan bahwa dengan adanya kegiatan ini</p>

		<p>pangan pemerintahan desa melalui kelembagaan lumbung pangan).</p>	<p>masyarakat petani mendapatkan bantuan pembangunan fisik tempat penyimpanan (lumbung) pangan yang diperuntukan kepada masyarakat petani agar dapat mengelola cadangan pangan mereka sendiri. Pengelolaan cadangan pangan masyarakat juga di fasilitasi dengan anggaran pengisian untuk mengisi stok cadangan pangan di dalam tempat penyimpanan (lumbung) yang diberikan oleh pemerintah.</p>
--	--	--	---

Dari hasil penelitian pertama yaitu berfokus pada penguatan cadangan pangan berdasarkan pada kebijakan Peraturan Walikota Batu nomor 16 Tahun 2017 tentang Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan. Sedangkan penelitian kedua, berfokus pada penguatan cadangan pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki Kebijakan Strategis Pembangunan Pangan dan Gizi 2015 – 2019 yang bermuara pada usaha pengelolaan cadangan pangan daerah, dan penelitian ketiga yaitu memiliki tujuan untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat dengan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah yaitu lumbung pangan.

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas terdapat kesamaan yaitu pada implementasi kebijakan, terhadap pengelolaan cadangan pangan dengan tujuan sebagai penguatan cadangan pangan, selain itu tujuannya juga untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Cadangan Pangan Dalam Memenuhi Kebutuhan Pangan di Kabupaten Jeneponto. Hal ini dimaksudkan agar keberhasilan implementasi pengelolaan cadangan pangan tepat sasaran dan memberikan peluang yang baik untuk para implementor terkait kebijakan ini

B. Kajian Teori

1. Konsep Implementasi

Implementasi menurut teori (Van Meter dan Van Horn dalam Agustino, 2010) : *“Those Activities directed toward putting a program into effect”* (proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya), sedangkan menurut Horn dan Meter: *“Those actions by public and private individual (or group) that are achievement or objectives set forth in prior policy”* (tindakan yang dilakukan pemerintah). Jadi implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Selanjutnya menurut Taufik dan Isril, 2013 sebagai sebuah hasil, maka implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh arah yang telah diprogramkan itu benar-benar memuaskan.

Dengan lebih ringkas menyebutkan dalam bentuk lebih umum, penelitian dalam implementasi menetapkan apakah organisasi dapat membawa bersama jumlah orang dan material dalam unit organisasi secara kohesif dan material dalam unit organisasi secara kohesif dan mendorong mereka mencari cara untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan Taufik dan Isril, 2013.

2. Konsep Implementasi Kebijakan

Mengembangkan model implementasi kebijakan mengasumsi bahwa implementasi kebijakan sejalan dengan proses kebijakan. Implementasi kebijakan menurut Gortner Harld Van Metter dan Carl Van Horn dalam (Yamin M.N 2016) bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan publik, implementor dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah variabel : aktivitas implementasi dan komunikasi antarorganisasi, karakteristik agen pelaksana/implementor, kondisi ekonomi-sosial-politik, dan kecenderungan (disposition) pelaksana/implementor.

Kemudian menurut Wibawa (Tahir, 2014), tujuan implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah. Keseluruhan proses penetapan kebijakan baru bisa dimulai apabila tujuan dan sasaran yang semula

bersifat umum telah diperinci, program telah dirancang dan juga sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut..

3. Konsep Pengelolaan

Menurut Wardoyo dalam (Zulfikar Putra, 2011) pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengelolaan sangat penting bagi setiap aktivitas individu atau kelompok dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan berorientasi pada proses (process oriental) yang berarti bahwa pengelolaan membutuhkan sumber daya manusia, pengetahuan, dan keterampilan agar aktivitas menjadi lebih efektif atau dapat menghasilkan Tindakan dalam mencapai kesuksesan. Oleh sebab itu, tidak akan ada organisasi yang akan sukses apabila tidak menggunakan pengelolaan yang baik (Torang, 2013).

George R. Terry dalam Sukarna (2011) membagi ada 4 fungsi pengelolaan yang dikenal dengan POAC antara lain :

- *Planning* (perencanaan), yaitu pemilihan fakta dan penghubungan fakta-fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan-perkiraan atau asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

- *Organizing* (pengorganisasian), pengorganisasian tidak dapat diwujudkan tanpa ada hubungan dengan yang lain dan tanpa menetapkan tugas-tugas tertentu untuk masing-masing unit. George R Terry dalam Sukarna (2011) mengemukakan bahwa pengorganisasian ialah penentuan, pengelompokan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang (pegawai) terhadap kegiatan-kegiatan ini, penyediaan faktor-faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan.
- *Actuating* (pelaksanaan/pergerakan), menurut George R Terry dalam Sukarna (2011) mengatakan bahwa pergerakan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pemimpin.
- *Controlling* (pengawasan), menurut George R Terry mengemukakan bahwa pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bilamana perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standar.

4. Konsep Pangan

Terdapat empat akar permasalahan pada distribusi pangan yang dihadapi : (1) dukungan infrastruktur, yaitu kurangnya dukungan akses terhadap pembangunan sarana jalan, jembatan dan lainnya, (2) sarana transportasi, yakni kurangnya perhatian pemerintah dan masyarakat didalam pemeliharaan sarana transportasi kita, (3) system transportasi, yang dianggap masih kurang efektif dan efisien. Selain itu, juga kurangnya koordinasi antara setiap moda transportasi mengakibatkan bahan pangan yang diangkut sering terlambat sampai ke tujuan, (4) masalah keamanan dan pungutan liar, yakni pungutan liar yang dilakukan oleh preman sepanjang jalur transportasi di Indonesia masih sering terjadi (Untung Cahyadi, 2014).

5. Konsep Cadangan Pangan

Menurut PerDa Nunukan Kalimantan Utara 2017 bahwa cadangan pangan adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah daerah berupa persediaan pangan yang disimpan di Gudang cadangan pangan pemerintah daerah, Gudang cadangan pangan pihak ketiga dan/atau lumbung pangan masyarakat, dalam menghadapi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, dan/atau keadaan darurat berupa bencana alam, bencana non alam, atau bencana sosial.

Cadangan pangan harus dikembangkan karena menjadi faktor penting dalam menunjang ketahanan pangan sehingga hal tersebut layak untuk dikembangkan. Apabila masalah cadangan pangan tidak dapat teratasi maka akan berujung pada kekurangan pangan sehingga menyebabkan masalah yang

serius. Cadangan pangan yang turun dari tahun ke tahun disebabkan oleh beberapa sebab seperti iklim yang tidak menentu, masa panen yang kurang merata, kejadian darurat seperti bencana menyebabkan cadangan makanan terkuras (Sukroso, 2017).

Sehingga Cadangan pangan adalah salah satu komponen yang menentukan ketersediaan pangan selain komponen produksi, penyiapan, distribusi, pemasaran dan kondisi ekonomi. Maka dari itu, pengelolaan cadangan pangan yang baik menjadi sangat penting dalam upaya mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup bagi seluruh penduduk dan mengupayakan agar setiap rumah tangga mampu mengakses pangan sesuai dengan kebutuhannya (Badan Ketahanan Pangan, 2009).

6. Konsep Masyarakat

Masyarakat sebagai *community* dapat dilihat dari dua sudut pandangan. Pertama memandang *community* sebagai unsur statis, artinya *community* terbentuk dalam suatu wadah/tempat dengan batas-batas tertentu, maka ia menunjukkan bagian dari kesatuan masyarakat sehingga ia dapat pula disebut sebagai masyarakat setempat, misalnya kampung, dusun atau kota-kota kecil. Masyarakat setempat adalah suatu wadah dan wilayah dari kehidupan sekelompok orang yang ditandai oleh adanya hubungan social. Disamping itu dilengkapi pula oleh adanya perasaan sosial, nilai-nilai dan norma-norma yang timbul atas akibat dari adanya pergaulan hidup atau hidup bersama manusia. Kedua, *community* dipandang sebagai unsur yang dinamis, artinya menyangkut suatu prosesnya yang terbentuk melalui faktor psikologis

dan hubungan antar manusia, maka didalamnya terkandung unsur-unsur kepentingan, keinginan atau tujuan-tujuan yang sifatnya fungsional (Abdul Syani, 2013).

Ciri-ciri dari masyarakat menurut Soekanto, 2012 yaitu :

1. masyarakat merupakan manusia yang hidup Bersama
2. bercampur untuk waktu yang cukup lama
3. mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan
4. mereka merupakan suatu system hidup bersama.

7. Konsep Ketersediaan Pangan

Ketersediaan pangan dilihat dari ketersediaan stok beras di rumah per hari dalam satu minggu terakhir kemudian dibandingkan dengan unit ekivalensi dewasa seluruh anggota rumah tangga, hasilnya dibandingkan dengan konsumsi normatif per individu (300 gram per hari), dikatakan kurang apabila ketersediaan pangan kurang dari konsumsi normatif dan dikatakan cukup apabila ketersediaan pangan lebih dari sama dengan konsumsi normatif. Keteraturan penerimaan raskin dilihat dari persepsi responden terkait teratur tidaknya dalam menerima raskin setiap bulannya, dikelompokkan menjadi teratur dan tidak teratur (Santi, 2015).

Indikator ketersediaan pangan berkaitan dengan produksi pertanian, iklim, akses terhadap sumberdaya alam, praktek pengelolaan lahan, pengembangan institusi, pasar, konflik regional dan kerusuhan sosial. Indikator akses pangan meliputi antara lain, sumber pendapatan, akses terhadap kredit modal, dan strategi rumah tangga untuk memenuhi kekurangan

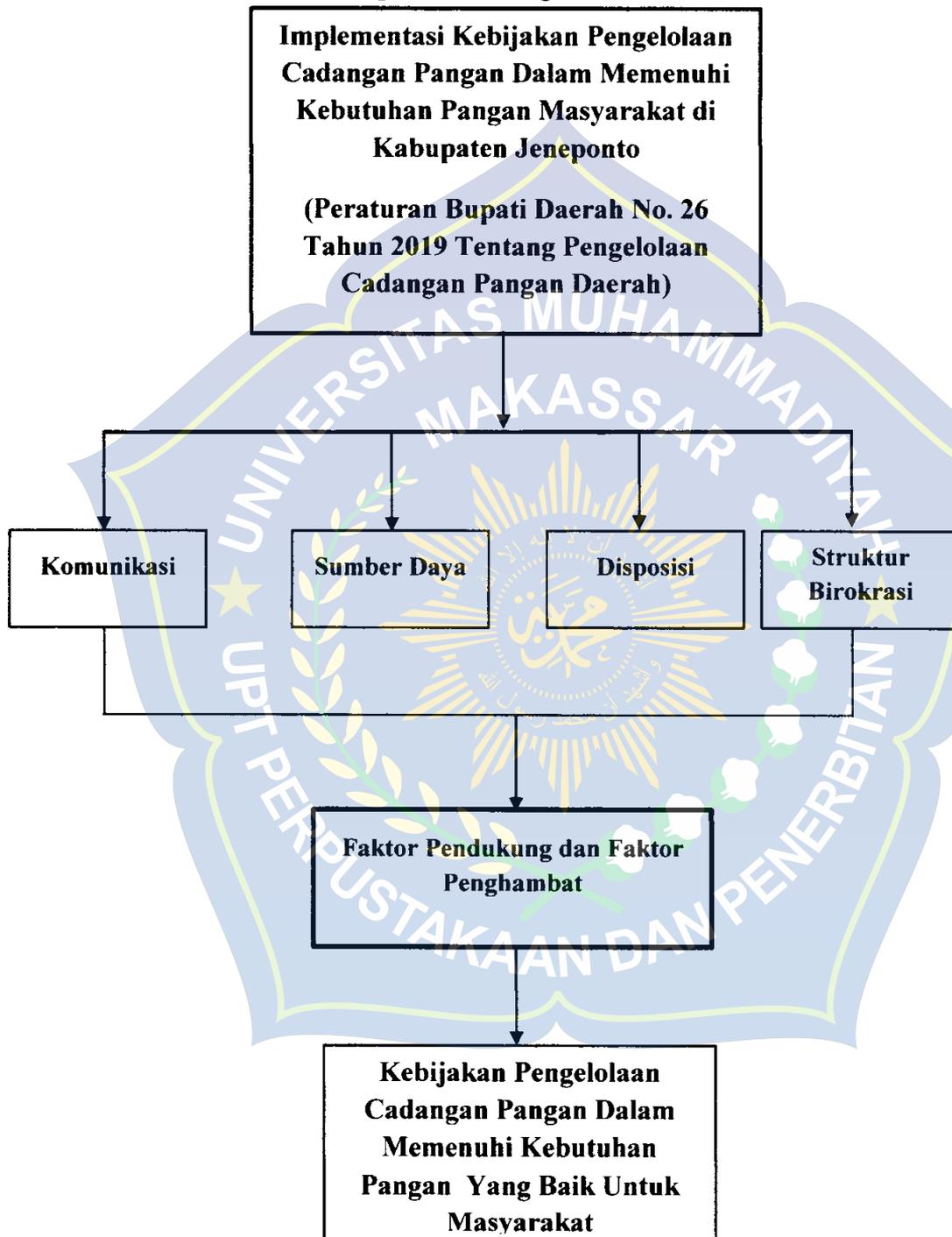
pangannya(*coping ability indicator*). Indikator dampak secara langsung adalah konsumsi dan frekuensi pangan, sedangkan indikator tak langsung meliputi status gizi dan penyimpanan pangan.

C. Kerangka Berpikir

Untuk mengetahui masalah yang akan diteliti, maka perlu adanya kerangka pikiran yang merupakan landasan dalam meneliti sebuah masalah untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu penelitian. Menurut kerangka berpikir ini dapat dilihat bahwa implementasi kebijakan sederhana dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk tindakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena wujudnya intervensi berbagai kepentingan.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

George C. Edward III dalam (Widodo 2010) menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan istilah *direct* dan *indirect impact on implementation*. Dalam pendekatan variabel yang sangat menentukan keberhasilan-keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu (1) komunikasi (2) sumber daya (3) disposisi (4) struktur birokrasi.

Bagan 2.1 Kerangka Pikir

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini tentang Implementasi Kebijakan Pengelolaan Cadangan Pangan dalam Memenuhi Kebutuhan Pangan Masyarakat di Kabupaten Jeneponto dengan menggunakan indikator : Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Komunikasi

Berdasarkan kerangka pikir yang telah diuraikan, maka penulis menyimpulkan bahwa komunikasi adalah suatu proses pertukaran pendapat atau pemberian informasi antara kedua belah pihak yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama. Komunikasi dalam penelitian ini adalah yang dilaksanakan oleh suatu organisasi/lembaga yaitu para pelaksana dari kebijakan pengelolaan cadangan pangan di Kabupaten Jeneponto atau Dinas Ketahanan Pangan dalam mengelola cadangan pangan, dan juga masyarakat sebagai tujuan dari pelaksanaan kebijakan tersebut.

Komunikasi yang diselenggarakan harus jelas dan juga konsisten agar tidak terjadi kesalahpahaman yang nantinya membuat masyarakat tidak mengerti mengenai kebijakan yang dilaksanakan. Selain itu perlu adanya komunikasi yang rutin dan mengikutsertakan seluruh masyarakat agar memperoleh komunikasi yang baik, jelas dan menyeluruh/merata, yang mampu mensosialisasikan tentang kebijakan pengelolaan cadangan pangan sesuai dengan Peraturan Bupati No. 26 Tahun 2019.

2. Sumber Daya

Peneliti menyimpulkan bahwa sumber daya adalah hal yang sangat penting karena berkaitan dengan pengelolaan. Dalam penelitian ini, sumber daya yang paling diperlukan adalah sumber daya manusia dan sumber daya pangan karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan kebijakan. Dimana sumber daya manusia memiliki peran sebagai penyelenggara atau pengelola cadangan pangan, sedangkan sumber daya pangan sebagai sumber pemanfaatan pangan yang dikelola.

Sumber daya manusia dalam penelitian ini terdiri dari pemerintah/lembaga yaitu Dinas Ketahanan Pangan yang terdiri dari staf pada bidangnya masing-masing. Dan sumber daya pangan yaitu cadangan pangan yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

3. Disposisi

Disposisi menurut peneliti adalah suatu keadaan dalam mengimplementasikan kebijakan Peraturan Bupati Jeneponto No. 26 Tahun 2019 tentang pengelolaan cadangan pangan daerah. Agar implementasi kebijakan berjalan dengan baik maka perlu adanya sikap jujur, komunikatif, komitmen, konsisten dan demokratis dari Dinas Ketahanan Pangan. Dengan adanya kebijakan yang berlaku maka Dinas Ketahanan Pangan memiliki acuan dalam melaksanakan implementasi kebijakan cadangan pangan seperti yang telah disusun dalam kebijakan tersebut.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah para pelaksana kebijakan yaitu Dinas Ketahanan Pangan dalam mengelola cadangan pangan di Kabupaten Jeneponto. Para pelaksana tersebut harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan adanya kesesuaian dalam melaksanakan kebijakan yang berlaku.

Variable keempat, menurut George C. Edward III (Leo Agustino, 2016) yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan public adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan. Kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi.

Dua karakteristik, menurut Edward III (Leo Agustino, 2016) yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi atau organisasi kearah yang lebih baik adalah :

- a. Membuat Standar Operating Procedures (SOP) yang lebih fleksibel, SOP adalah salah satu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai atau pelaksana kebijakan seperti aparatur, administrator atau birokrat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pada setiap harinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau standar minimum yang dibutuhkan warga.

- b. Melaksanakan fragmentasi, tujuannya untuk menyebar tanggungjawab berbagai aktivitas, kegiatan atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing, dengan terfragmentasinya struktur birokrasi, maka implementasi akan lebih efektif karena dilaksanakan oleh organisasi yang kompeten dan kapabel.

5. Kebijakan

Untuk mencapai tujuan yang akan dilaksanakan dalam pengelolaan cadangan pangan, tidak hanya membutuhkan komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Hal lain yang sangat penting adalah perlu adanya kebijakan yang mengatur pengelolaan cadangan pangan. Kebijakan yang berlaku dalam mengelola cadangan pangan di Kabupaten Jeneponto adalah berdasarkan pada Peraturan Bupati Jeneponto No. 26 Tahun 2019 tentang pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Ketahanan Pangan di Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Tarowang dan Kecamatan Rumbia agar peneliti memperoleh data, informasi, dan gambaran yang sesuai dengan apa yang akan diteliti. Selain itu, penelitian dilaksanakan secara langsung di Dinas Ketahanan Pangan, Kecamatan Tarowang dan Kecamatan Rumbia agar memperoleh data yang valid mengenai implementasi kebijakan pengelolaan cadangan pangan di Kabupaten Jeneponto. Penelitian ini dilaksanakan pada 9 Juni-9 Juli 2022.

B. Jenis

Metode yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian kualitatif. Kualitatif merupakan suatu proses penelitian yang dilakukan secara wajar dan natural sesuai dengan kondisi objektif dilapangan yaitu di Dinas Ketahanan Pangan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan, memahami, menjelaskan dan memperoleh data terkait dengan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Cadangan Pangan Dalam Memenuhi Kebutuhan Pangan Masyarakat di Kabupaten Jeneponto. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang dimaksudkan agar mampu memahami fenomena mengenai apa yang dialami oleh subjek yang diteliti, mulai dari tindakan, persepsi, dan perilakunya.

Penelitian ini dilakukan berdasarkan observasi dengan implemmentasi kebijakan cadangan pangan karena peneliti berupaya untuk menggali data dari responden yang menjadi sumber dalam penelitian ini. Metode ini juga dilakukan dilapangan dengan alasan agar peneliti dapat berinteraksi dengan responden dan bisa melihat serta mengamati secara langsung tindakan objek yang akan diteliti di Dinas Ketahanan Pangan, Kecamatan Tarowang dan Kecamatan Rumbia, terkait dengan implementasi kebijakan pengelolaan cadangan pangan.

C. Objek Penelitian

Objek penelitian yang dituju adalah di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto, masyarakat Kecamatan Tarowang dan Kecamatan Rumbia. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu subjek yang mengetahui informasi objek penelitian. Informan dalam penelitian ini yaitu pelaku yang benar-benar mengetahui dan menguasai masalah serta yang terlibat langsung dengan masalah peneliti.

Informan yang dipilih sebagai sumber data dalam penelitian ini yaitu berdasarkan pada asas subjek yang menguasai permasalahan, mempunyai data serta bersedia untuk menyerahkan informasi lengkap dan akurat. Informan yang bertindak sebagai sumber data dan informasi harus memenuhi syarat, jadi yang akan menjadi informan peneliti dalam penelitian ini adalah pegawai/staf Dinas Ketahanan Pangan di Kabupaten Jeneponto, masyarakat Kecamatan Tarowang dan Kecamatan Rumbia.

Beberapa kriteria penentu informan kunci yang tepat, dalam pemberian informasi dan data yang tepat dan akurat mengenai implementasi kebijakan pengelolaan cadangan pangan di Dinas Ketahanan Pangan di Kabupaten Jeneponto yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.1 Informan Penelitian

Informan
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto
Kabid Konsumsi dan Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto
Kasi Sumber Daya Pangan Kabupaten Jeneponto
Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto
Kasi Distribusi Pangan
Masyarakat

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data primer

Data primer yaitu data terpenting dalam penelitian yang akan diteliti. Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari sumber. Sehingga dengan data primer inilah nantinya sangat bermanfaat dan membantu peneliti untuk memperoleh data yang diteliti melalui kegiatan wawancara dan jawaban dari daftar pertanyaan yang akan diajukan.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data pendukung data primer, data sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang didapatkan bukan secara langsung dari sumbernya tetapi secara tertulis seperti sumber dari buku, jurnal ilmiah, dan dokumen-dokumen dari pihak instansi terkait.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini digunakan tiga model pengumpulan data, antara lain :

1. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data secara langsung atau pengamatan langsung yaitu cara pengambilan data menggunakan mata. Dengan metode observasi inilah diperoleh metode lain yang nantinya memberikan beberapa keuntungan, seperti terdapat kemungkinan untuk mencatat hal-hal, perilaku, fenomena sosial yang terjadi ditempat penelitian. Dengan pengamatan secara langsung ini maka dapat diperoleh data dari subjek yang tidak dapat berkomunikasi secara verbal maupun tidak mau berkomunikasi secara verbal. Teknik observasi adalah teknik pengamatan secara langsung yang terjadi di lapangan yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Cadangan Pangan.

2. Wawancara

Wawancara adalah sebuah percakapan yang mempunyai maksud tertentu karena dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban dari

pertanyaan yang diajukan. Dengan melakukan wawancara ini nantinya peneliti akan memperoleh data-data melalui sistem tanya jawab.

3. Dokumentasi

Kegiatan dokumentasi adalah pengumpulan data-data yang diperoleh dengan menggunakan catatan tertulis yang ada dilokasi penelitian serta sumber-sumber lain yang menyangkut dengan masalah yang diteliti pada instansi terkait. Melalui dokumentasi ini peneliti mengumpulkan data-data berupa peta lokasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto dan melalui foto-foto digunakan nanti.

F. Teknik Analisis Data

Analisis deskriptif kualitatif yakni dengan memberikan alasan atau interpretasi terhadap data yang diperoleh sehingga menjadi lebih jelas dan bermakna.

Berdasarkan metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif, maka teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif disini adalah analisis terhadap informasi yang diperoleh berdasarkan pada kemampuan nalar peneliti dalam menghubungkan fakta-fakta data yang diperoleh dilapangan.

Adapun teknik analisis data dalam tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data, pengabstraksikan dan transformasi data kasar yang muncul diwawancara. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, mengelompokkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan pengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan dapat ditarik dan diverifikasi (Miles dan Huberman, 1992). Setelah data diklasifikasi atas dasar tema maka peneliti melakukan abstraksi data kasar tersebut menjadi uraian singkat.

2. Tahap penyajian data

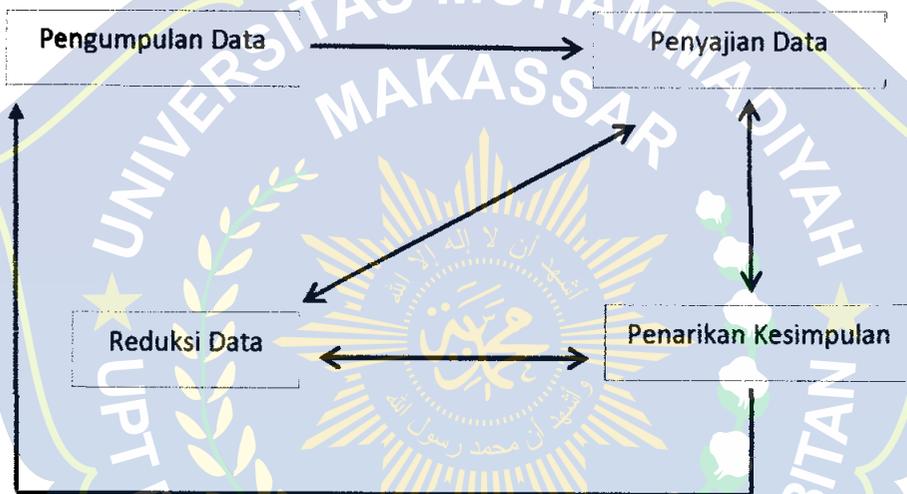
Data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data yang didapatkan dari wawancara mendalam terhadap staf dikumpulkan lalu diambil sehingga kesimpulannya dijadikan dalam bentuk narasi deskriptif. Untuk menyajikan data, peneliti ditekankan untuk mampu menyusun secara terstruktur, sistematis dan simultan jadi data yang didapatkan akan menjelaskan atau memberikan jawaban atas masalah yang diteliti, maka peneliti harus memperhatikan secara detail dan tidak gegabah dalam mengambil kesimpulan. (Miles dan Huberman 1992)

3. Tahap penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah analisis lanjutan dari reduksi data data sehingga data disimpulkan dan peneliti masih memiliki peluang untuk menerima masukan. Pada tahap ini, peneliti selalu melakukukan uji kebenaran

pada setiap makna yang muncul dari data. Data yang menunjang komponen uraian diklarifikasi kembali dengan informan. Jika hasil klarifikasi memperkuat simpulan atas data yang valid maka pengumpulan data siap dihentikan.

Bagan 2.2 Komponen-Komponen Analisis Data Model Interaktif



G. Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik triangulasi. Dimana menurut Lexy J. Moleong (2012) triangulasi adalah teknik pengecekan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data tersebut guna memenuhi kebutuhan pengecekan atau sebagai pembanding antara data tersebut. Denzin (menurut Lexy j. Moleong, 2012) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pengecekan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data triangulasi dengan sumber dan triangulasi dengan metode. Menurut Patton (dalam Lexi J. Moleong, 2012) triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Sedangkan triangulasi dengan metode menurut Patton (dalam Lexi J. Moleong 2012:330) terdapat dua strategi, yaitu (1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan (2) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

Dalam teknik triangulasi dengan sumber ini peneliti membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari masing-masing sumber atau informan penelitian sebagai pembanding untuk mengecek kebenaran informasi yang diperoleh. Selain itu peneliti juga melakukan pengecekan derajat kepercayaan melalui teknik triangulasi menggunakan metode, yakni dengan melakukan pengecekan hasil penelitian dengan teknik pengumpulan data yang berbeda yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga derajat kepercayaan data dapat valid.

Terdapat empat macam triangulasi yang digunakan sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan sumber, metode, penyidik dan teori yang dikemukakan oleh Norman K. Denkin menurut definisinya triangulasi sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda.

Menurutnya, triangulasi meliputi empat hal, yakni : (1) triangulasi metode, (2) triangulasi antar peneliti (jika penelitian dilakukan dengan kelompok), (3) triangulasi sumber data, dan (4) triangulasi teori (Moleong, 2009).

- 1. Triangulasi Metode** dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Dalam penelitian kualitatif penelitian menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei. Agar memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti dapat menggunakan metode wawancara dan observasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Selain itu, peneliti juga dapat menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Triangulasi tahap ini dilakukan ketika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya.
- 2. Triangulasi sumber data** adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (*participant observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti.
- 3. Triangulasi teori.** Hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau *thesis statement*. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti

atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu, triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman pemahaman asalkan peneliti mampu menggali pengetahuan teoretik secara mendalam atas hasil analisis data yang telah diperoleh. Berdasarkan keempat jenis triangulasi tersebut, peneliti menggunakan triangulasi metode untuk menguji keabsahan data yang diperoleh. Dimana peneliti akan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi untuk mendapatkan informasi yang akurat. Kemudian peneliti akan membandingkan informasi yang didapat dari beberapa informan yang berbeda, untuk memperoleh kebenaran atas data dan hasil yang didapatkan.

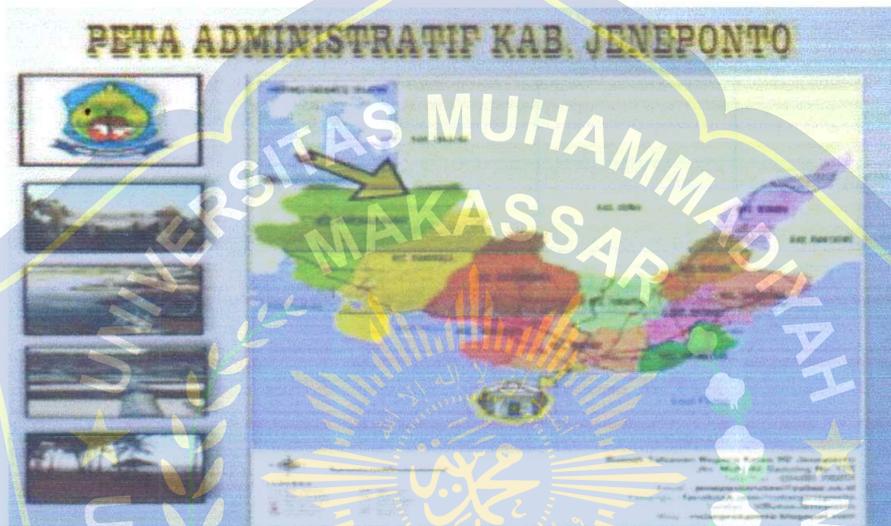


BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Deskripsi Kabupaten Jeneponto



Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Jeneponto

Berdasarkan peta administrasi Kabupaten Jeneponto adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, dengan luas wilayah 749,79 km² dengan Kecamatan Bangkala Barat sebagai kecamatan paling luas yaitu 152,96 km² atau setara 20,4 persen luas wilayah Kabupaten Jeneponto, sedangkan Kecamatan terkecil adalah Arungkeke yakni seluas 29,91 km² dan meliputi 11 kecamatan. Kabupaten Jeneponto terletak antara 5°16'13"-5°39'34" Lintang Selatan dan 12°40'19"-12°7'31" Bujur Timur. Berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Takalar, disebelah utara, Kabupaten Bantaeng disebelah timur Kabupaten Takalar sebelah barat dan laut flores disebelah selatan.

Kondisi tipografi Kabupaten Jeneponto pada bagian utara terdiri dari dataran tinggi dengan ketinggian 500 sampai dengan 1.400 meter diatas permukaan air laut (mdpl) yang merupakan lereng pegunungan Gunung Baturape-Gunung Lompobattang. Sedangkan bagian tengah berada ketinggian 100 sampai dengan 500 mdpl dan pada bagian selatan merupakan pesisir serta dataran rendah dengan ketinggian antara 0 sampai dengan 100 mdpl. Karena perbatasan dengan laut flores maka Kabupaten Jeneponto memiliki pelabuhan cukup besar yang terletak di desa Bungeng.

Kabupaten Jeneponto memiliki beberapa sungai (hidrologi) yang sebagian telah dibendung yaitu Kelara, Tino, Poko Bulo yang telah berfungsi untuk mengairi sebagian lahan persawahan. Daerah bagian selatan memiliki perairan laut (flores) dengan panjang pantai berkisar 114 km.

Daftar Kecamatan Di Kabupaten Jeneponto

No.	Kecamatan	Luas Wilayah
1.	Arungkeke	32,44 km ²
2.	Bangkala	130,95 km ²
3.	Bangkala Barat	164,55 km ²
4.	Batang	31,05 km ²
5.	Binamu	67,43 km ²
6.	Bontoramba	95,71 km ²
7.	Kelara	49,18 km ²

8.	Rumbia	62,81 km ²
9.	Tamalatea	65,54 km ²
10.	Tarowang	42,98 km ²
11.	Turatea	58,68 km ²

Berdasarkan pada uraian, Kecamatan Tarowang dan Kecamatan Rumbia memiliki perbedaan luas wilayah yaitu Tarowang sebesar 42,98 km² sedangkan Rumbia sebesar 62,81 km².

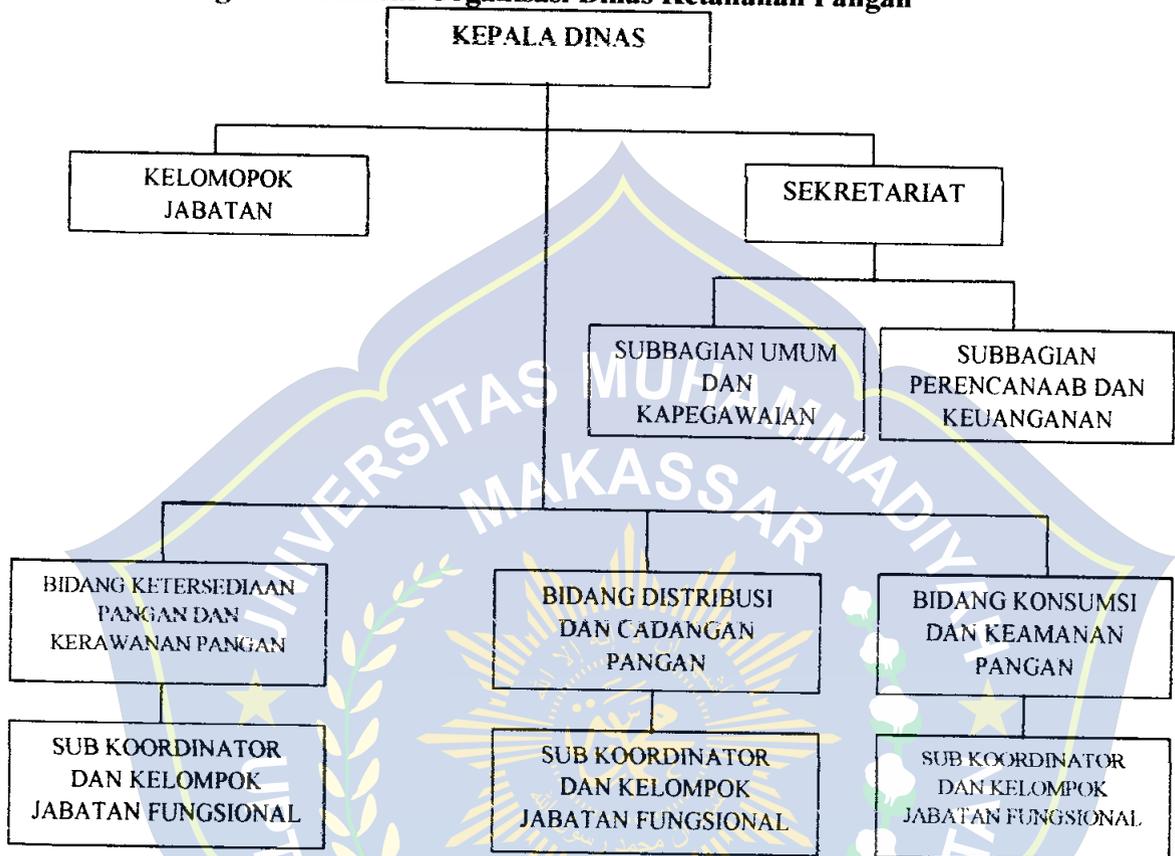
2. Deskripsi Kantor Dinas Ketahanan Pangan

Dinas ketahanan pangan merupakan unsur penunjang mempunyai tugas pokok mendukung dan membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan konkuren bidang pangan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto terletak di Kecamatan Binamu dan memiliki beberapa bidang yaitu Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan. Adapun pegawai berjumlah 52 orang yang terbagi dalam bidang, sub bagian dan seksi.

1. Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Jeneponto No. 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tata Usaha dan Fungsi, Serta Tata Kerja di Ketahanan Pangan maka struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto dapat dilihat dibawah ini :

Bagan 2.3 Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan



2. Tugas dan fungsi

- 1.) Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.
- 2.) Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.
- 3.) Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.

- 4.) Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.
- 5.) Pemantauan pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.
- 6.) Pelaksanaan administrasi dinas pangan.
- 7.) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dinas Ketahanan Pangan ini adalah salah satu bentuk upaya pemerintah dalam mengatur dan mengelola pangan yang ada di setiap Kabupaten/Kota agar memberikan inovasi dan juga peningkatan pengelolaan sumber daya pangan. Dinas ketahanan pangan juga merupakan unsur yang sangat penting dalam pengelolaan cadangan pangan karena mampu melaksanakan program-program yang membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan. Jeneponto merupakan salah satu wilayah yang memiliki lahan pangan yang luas dan sangat berpotensi meningkatkan produksi pangan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pangan.

A. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Cadangan Pangan Dalam Memenuhi Kebutuhan Pangan Masyarakat Di Kabupaten Jeneponto

Pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah dimaksudkan untuk mendorong terjadinya penyediaan cadangan pangan daerah di tingkat kabupaten dalam menghadapi keadaan darurat dan pasca bencana serta

melindungi petani/produsen pangan strategis sesuai dengan potensi daerah dari gejolak penurunan harga pada waktu panen.

Pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan penyediaan pangan dalam menjamin pasokan pangan yang stabil, memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan paceklik berkepanjangan serta antisipasi kerawanan pangan pasca bencana, dan meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan terutama pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana dan paceklik berkepanjangan maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan. Untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat kabupaten Jeneponto maka akan dibahas sebagai berikut :

1. Komunikasi

Dalam melaksanakan kegiatan atau program, sangat penting dilaksanakan komunikasi yang baik komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto berdasarkan hasil wawancara :

“bentuk komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, karena standar operasional prosedur yang dilaksanakan dari pemerintah pusat maka bentuk komunikasi yang dilaksanakan di komunikasikan melalui sosialisasi Dinas Ketahanan Pangan dan masyarakat. Sosialisasi ini biasanya dilaksanakan di kantor Dinas Ketahanan Pangan atau juga berkunjung ke desa jika terdapat program di desa tersebut” (wawancara dengan kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto 5 mei 2022).

Sesuai dengan penjelasan yang dijelaskan oleh informan, maka dapat diketahui bahwa bentuk komunikasi dari pemerintah dilakukan

melalui sosialisasi. Komunikasi mengenai kebijakan pengelolaan cadangan pangan harus disampaikan dengan sejelas-jelasnya agar masyarakat Jeneponto memahami bagaimana implementasi dan maksud dari tujuan kebijakan tersebut. Selain itu, sosialisasi dilaksanakan di kantor Dinas Ketahanan Pangan atau di desa tertentu yang memiliki tujuan dari kebijakan atau program yang akan dilaksanakan.

“komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam menyusun rancangan-rancangan dari tujuan yang akan dicapai, sehingga kami yang memiliki peran dalam pelaksanaan setiap kebijakan yang ada di Dinas Ketahanan Pangan memiliki banyak tugas dan fungsi diantaranya memberikan informasi kepada masyarakat. Melalui pelaksanaan sosialisasi maka dibutuhkan komunikasi yang baik kepada masyarakat, salah satu bentuk komunikasi kami itu ada beberapa antara lain dengan melaksanakan sosialisasi secara langsung dan juga membentuk kelompok masyarakat yang memiliki ilmu dasar terkait dengan mengelola pangan yang baik.” (wawancara dengan Kabid Konsumsi dan Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto 5 Mei 2022)

Dari penjelasan diatas maka dapat diketahui bahwa komunikasi adalah hal yang sangat penting dalam mempersiapkan pelaksana kebijakan maupun dalam lingkup lembaga/kelompok masyarakat yang memiliki wawasan dan ilmu terkait dengan bertani yang baik dan memiliki fungsi untuk meningkatkan sumber daya pangan untuk didistribusikan kepada masyarakat nantinya. Pembentukan kelompok tani dalam masyarakat itu akan sangat membantu dalam meningkatkan hasil pangan dan dengan kualitas yang baik.

“Bagi masyarakat komunikasi adalah hal yang sangat penting, karena tanpa adanya komunikasi maka tidak akan ada informasi dan ilmu yang diperoleh. Masyarakat baru akan bergerak ketika terjalin komunikasi, perlu adanya bimbingan yaitu melalui sosialisasi seperti

yang ditelaah dilakukan selama ini, untuk mengembangkan pemikiran masyarakat dalam meningkatkan pangan” (wawancara dengan Masyarakat Tani 6 mei 2022).

Masyarakat memiliki peran dalam meningkatkan cadangan pangan, meskipun tidak semua masyarakat tahu cara bertani tetapi kebanyakan dari mereka memiliki ilmu dasar yang dapat digunakan dalam prakteknya. Dengan adanya komunikasi maka ada kemudahan dan ada solusi dalam mengatasi permasalahan yang terjadi.

2. Sumber Daya

Sumber daya yang difungsikan dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan cadangan pangan antara lain adalah :

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dilibatkan dalam pelaksanaan kebijakan adalah aparatur Dinas Ketahanan Pangan dan juga masyarakat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.

“Terkait dengan sumber daya manusia di Kabupaten Jeneponto sendiri itu banyak atau dapat dikatakan sumber dayanya sudah lebih. Terlebih di Kabupaten Jeneponto sendiri hanya panen sekali atau dua kali selama satu tahun, sehingga sumber daya manusianya sudah terpenuhi. Selain itu, masyarakat dapat berkembang dengan inovasi, yaitu dengan melaksanakan cadangan pangan secara mandiri, di lahan sendiri dan dengan bantuan ilmu tentang pangan” (wawancara dengan Kasi Sumber Daya Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto 5 juli 2022)

Dari penjelasan informan yang dijelaskan diatas, maka dapat diketahui bahwa sumber daya manusia menjadi salah satu hal yang penting dalam melaksanakan pengelolaan cadangan pangan di Kabupaten Jeneponto. Dengan adanya sumber daya manusia akan mempermudah

serta mempercepat proses pengelolaan, sehingga peningkatan kualitas dan mutu pangan dapat tercapai dengan baik. Selain itu dibutuhkan ilmu tentang mengelola pangan dengan baik untuk masyarakat agar dapat bermanfaat bagi kegiatan yang dilaksanakan.

“Sebagai masyarakat maka yang kami memerlukan informasi yang mendalam mengenai pangan, karena tanpa adanya komunikasi dengan pemerintah masyarakat tidak akan tahu hal apa yang perlu dikerjakan, harus dikoordinasikan. Selain itu juga masyarakat perlu dibimbing untuk mencapai tujuan yang akan dicapai.” (wawancara dengan masyarakat Jeneponto 6 mei 2022)

Masyarakat Jeneponto sangat perlu mengetahui apa pentingnya kebijakan dan juga pelaksanaan program tentang pengelolaan cadangan pangan, sehingga dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat perlu juga bantuan dari masyarakat.

2. Sumber Daya Pangan

Sumber daya pangan menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam melaksanakan program-program Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto. Pemanfaatan sumber daya pangan ini merupakan sumber yang harus tersedia untuk masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan hidup dan juga kualitas pemerintah dalam memberikan pangan.

Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga terjangkau oleh daya beli masyarakat, sehingga tidak bertentangan dengan perekonomian masyarakat. Hal ini menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat tidak mampu membeli karena faktor harga yang terlalu tinggi.

“Untuk sumber daya pangan sendiri sebenarnya ini hal yang menjadi masalah sejak awal, tetapi dengan adanya tingkat sumber daya manusia yang tinggi sehingga mengubah persepsi masyarakat terhadap pangan di Kabupaten Jeneponto. Menurut data, tingkat kemiskinan masyarakat Jeneponto sangat tinggi tetapi ketika melihat kenyataan dilapangan malah masyarakat Jeneponto memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi”(wawancara dengan Kasi Sumber Daya Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto 5 juni 2022).

Dari penjelasan informan tersebut diatas, dapat diketahui bahwa meskipun masalah utama yang terjadi adalah kekurangan sumber daya pangan tetapi dengan adanya tingkat sumber daya manusia yang tinggi sehingga dapat mengorganisir kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam hal pemenuhan pangan. Selain itu, pangan harus memiliki kualitas yang baik dan Jeneponto merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki lahan yang luas untuk bercocok tanam, sehingga yang dibutuhkan adalah ilmu bercocok tanam yang baik.

“Pangan adalah kebutuhan pokok masyarakat yang harus terpenuhi, baik itu berasal dari pangan sendiri ataupun berupa bantuan dari pemerintah. Pangan menjadi konsumsi sehari-hari masyarakat, sehingga ketika terjadi hal-hal yang tidak terduga seperti banjir atau bencana alam lainnya, kemudian timbul kecemasan masyarakat. Seharusnya masyarakat mampu bercocok tanam secara mandiri karena banyak masyarakat yang memiliki lahan yang luas tetapi tidak mampu mengelola dengan baik” (wawancara dengan Kasi Sumber Daya Pangan 5 mei 2022)

Sebagai kebutuhan pokok, pangan dipacu untuk selalu diproduksi terus menerus. Dalam hal cadangan pangan yang dikelola oleh pemerintah juga harus disediakan dalam stok yang cukup sehingga ketika terjadi bencana yang tidak diinginkan pangan dapat dibagikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Dalam pengelolaan cadangan pangan hanya diproduksi secara terbatas, dengan harapan bahwa masyarakat yang

memiliki lahan bisa bercocok tanam secara mandiri, itulah mengapa pemerintah memberikan bantuan bibit dan pupuk agar dapat menghasilkan produksi pangan sendiri yang dapat dikonsumsi maupun dipasarkan.

3. Sumber Daya Anggaran

Dalam pelaksanaan kegiatan atau program maka perlu adanya anggaran dana yang digunakan untuk membeli peralatan ataupun bahan. Sumber dana disini berasal dari pemerintah pusat/provinsi yang diperuntukkan pada hal-hal yang dibutuhkan dalam melaksanakan pengelolaan cadangan pangan di Kabupaten Jeneponto.

“Sumber dana yang didapatkan itu berasal dari pemerintah pusat/provinsi, yang diberikan kepada Dinas Ketahanan Pangan kemudian dipergunakan untuk keperluan masyarakat dalam mengelola cadangan pangan. Adapun anggaran ini berdasarkan pada Peraturan Bupati No. 26 Tahun 2019 tentang pengelolaan cadangan pangan daerah” (wawancara dengan Kasubag Perencanaan Keuangan 5 mei 2022).

Sumber daya anggaran sangat diperlukan dalam melaksanakan program, sumber daya disini berdasarkan dalam kebijakan Peraturan Bupati No. 26 Tahun 2019 pada Pasal 5 yaitu :

(1) Besaran Dana Cadangan Pangan, diperuntukkan untuk Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Tahun 2019 yang di alokasikan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD Dinas Ketahanan Pangan.

(2) Besaran Dana Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Disposisi

Disposisi/sikap adalah faktor yang sangat penting dalam melaksanakan kebijakan implementasi. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Disposisi dalam hal ini adalah berkaitan dengan kesediaan para implementor dalam memaparkan/mensosialisasikan kebijakan yang dimaksud.

Ada tiga bentuk sikap implementor terhadap kebijakan yaitu kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Disamping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program.

Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan

dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program.

Selain itu perlu adanya prioritas program untuk Dinas Ketahanan Pangan agar para pelaksana mampu memenuhi dan memahami kebijakan yang dilaksanakan. Berdasarkan potensi pertanian yang terdapat di Kabupaten Jeneponto, maka Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto menetapkan dan merumuskan beberapa program prioritas, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Program pengembangan sumber daya manusia (SDM) aparat dan petani/peternak, melalui kegiatan:
 1. Peningkatan keterampilan petugas dan petani melalui pelatihan, magang, dan studi banding;
 2. Peningkatan pendidikan aparat pertanian ke jenjang yang lebih tinggi (Diploma, S1 dan seterusnya);
 3. Pelatihan petugas dan petani dengan memanfaatkan potensi lokal;
 4. Pengembangan sistem kerja latihan dan kunjungan dengan memanfaatkan tenaga penyuluh dan tenaga teknis lainnya.
2. produksi bahan pangan akan dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain :
luas lahan yang dimiliki oleh petani, sistem pengairan atau irigasi yang ada, tenaga kerja yang dalam hal ini petani sebagai pelaksana usaha tani, dan juga bagaimana petani menangani pascapanen padi tersebut. Beberapa kegiatan pasca panen yang biasa dilakukan oleh petani padi, seperti alat

perontok yang digunakan, sistem Penyimpanan di tingkat petani, pengeringan gabah, sampai pada tahap di mana beras tersebut siap untuk dikonsumsi atau dijual. Dalam kegiatan pasca panen tersebut tidak tertutup kemungkinan akan terjadi kehilangan (losses) yang tentunya akan sangat berpengaruh terhadap ketersediaan bahan pangan secara keseluruhan.

“Akses masyarakat terhadap bahan pangan juga perlu diperhatikan, karena dengan begitu distribusi pangan yang dipasarkan dapat dijangkau oleh masyarakat. Kebanyakan masyarakat mengeluh karena harga kebutuhan pangan yang tinggi sedangkan mereka harus memenuhi kebutuhan itu untuk keluarga. Sehingga kembali lagi seperti yang saya singgung sebelumnya bahwa masyarakat harus terbuka terhadap pengelolaan pangan secara mandiri, masyarakat kan punya lahan maka sudah seharusnya memanfaatkan lahan yang dimiliki untuk bertani dan menghasilkan pangan sendiri” (wawancara dengan Kasi Distribusi Pangan 5 mei 2022)

Selain masalah ketersediaan bahan pangan, maka faktor lain yang akan menentukan tingkat ketahanan pangan suatu daerah atau rumah tangga adalah akses masyarakat terhadap bahan pangan, dimana akses tersebut akan sangat ditentukan oleh distribusi bahan pangan yang merata ke seluruh wilayah tersebut, dan tingkat pendapatan masyarakat, sehingga mereka dapat menjangkau atau membeli bahan pangan yang dibutuhkan. Hal ini dimaksudkan bagi masyarakat yang tidak mampu untuk memproduksi bahan pangan yang dibutuhkan seperti yang banyak terjadi pada daerah perkotaan.

Faktor lain yang tak kalah pentingnya juga akan mempengaruhi ketahanan pangan suatu daerah atau masyarakat adalah bagaimana masyarakat memanfaatkan bahan pangan yang dimilikinya. Meskipun bahan pangan yang cukup telah mereka miliki, akan tetapi jika tingkat

konsumsi pangannya utamanya anak-anak balita tidak mencukupi sesuai dengan standard yang dibutuhkan, maka tentu saja gejala gejala kekurangan pangan atau kekurangan gizi akan terjadi. Kekurangan pangan dan gizi bias terjadi karena bahan pangan yang dikonsumsi tidak mencukupi baik secara kuantitas maupun kualitasnya.

“Sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat dalam keadaan genting begini satu-satunya hanya bantuan dari pemerintah, karena kalau tidak begitu maka masyarakat harus mencari pekerjaan lain untuk mampu membeli kebutuhan pangan. Disamping itu jika terdapat lahan maka masyarakat tetap membutuhkan bantuan berupa bibit dan pupuk dari pemerintah” (wawancara dengan Masyarakat Kabupaten Jeneponto 6 mei 2022)

Dari hasil wawancara tersebut diatas dapat diketahui bahwa bantuan pemerintah merupakan satu-satunya harapan bagi masyarakat dalam menyambung kebutuhan pangan. Walaupun sebagian besar masyarakat memiliki lahan yang luas tetapi perekonomian masyarakat tidak mendukung untuk membeli bibit dan pupuk maka sama saja, masyarakat tetap mengharapkan bantuan dari pemerintah. Pemerintah juga telah berupaya melaksanakan program-program yang dapat membantu meningkatkan produksi pangan masyarakat.

4. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan suatu organisasi yang digunakan pemerintah untuk dapat mengantisipasi terhadap tuntutan perubahan dan perkembangan lingkungan yang terjadi didalam masyarakat, dan proses

perubahan tersebut sangat memberikan pengaruh terhadap birokrasi pemerintah.

Adapun struktur birokrasi merupakan para pelaksana kebijakan yang harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki keinginan dan sumber daya yang cukup untuk melakukannya.

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selain itu, cakupan atau wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

Standar Operasional Prosedur (SOP) dikembangkan sebagai respon internal terhadap keterbatasan waktu dan sumber daya dari pelaksana dan keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. SOP yang bersifat rutin didesain untuk situasi tipikal dimasa lalu mungkin menghambat perubahan dalam kebijakan karena tidak sesuai dengan situasi atau program baru.

Standar Operasional Prosedur (SOP) sangat mungkin menghalangi implementasi kebijakan-kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personal baru untuk mengimplementasikan

kebijakan. Semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang rutin dari suatu organisasi, semakin besar probabilitas SOP menghambat implementasi.

Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dipakai oleh Dinas Ketahanan Pangan adalah sesuai dengan Kebijakan yang diturunkan oleh Pemerintah Pusat/Provinsi sebagai acuan dalam pelaksanaan cadangan pangan. Dengan adanya Standar Operasional Prosedur ini dapat membantu Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan program bantuan kepada masyarakat

“SOP yang digunakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Jeneponto itu adalah berdasarkan oleh Pemerintah Pusat/Provinsi, pemerintah dalam hal ini tidak mengurus padi, tetapi bagaimana agar padi tidak terbuang-buang dan dikelola dengan baik, artinya padi diolah secara maksimal agar petani tidak rugi. Dengan ini pemerintah memberikan bantuan berupa lumbung pangan, gudang, lantai jemur, dan gilingan padi yang dinamakan beras beras medium unit dengan keunggulan gilingan padi yang tidak patah-patah dan menghasilkan beras kepala. Perbandingan pengelolaan padi jaman dulu dan jaman sekarang sangat berbeda, dulu pengelolaan padi itu masih patah-patah karena digiling secara manual sedangkan sekarang bagus karena beras yang digiling dengan mesin otomatis sehingga manernya berkurang. Dalam melaksanakan SOP yang dikeluarkan oleh Dinas Ketahanan Pangan, alhamdulillah kami bisa melaksanakannya dengan baik” (wawancara dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto 5 juni 2022)

Dari penjelasan informan tersebut diatas, dapat diketahui bahwa Standar Operasional Prosedur Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto berdasarkan kebijakan dari pemerintah pusat/provinsi, yang menjadi landasan dalam menjalankan program-program yang dilaksanakan. Dengan adanya Standar Operasional Prosedur ini dapat

membantu Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan pengelolaan pangan, berupa adanya fasilitas-fasilitas yang memadai untuk masyarakat agar meningkatkan kualitas dan jumlah pangan dengan kualitas yang baik.

Adapun ciri-ciri birokrasi antara lain :

1. Adanya peraturan yang harus ditaati.
2. Pejabat bekerja penuh perhatian sesuai kemampuan masing-masing.
3. Pejabat diangkat sesuai syarat teknis dan peraturan.
4. Adanya pemilahan yang tegas antara urusan dinas dan pribadi.

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Dengan tujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat, melindungi hak-hak masyarakat, mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat, dan pada akhirnya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

“Sesuai dengan SOP kami bekerja dibawah naungan pemerintah pusat/provinsi, kemudian berdasarkan pada Peraturan Bupati No. 26 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang mengatur segala mekanisme tentang pengelolaan cadangan pangan, kami menyesuaikan pada kebijakan tersebut. Sudah menjadi aturan yang terikat dengan Dinas Ketahanan Pangan yang harus ditaati dan dijalankan agar teratur dan konsisten” (wawancara dengan Kabid Distribusi dan Harga Pangan 5 mei 2022)

Di dalam makna birokrasi, fragmentasi berarti pembiakan dan pembuatan lain sebuah wadah birokrasi (sistem pemerintahan baru/untuk mengatasi pelayanan administrasi negara). Fragmentasi birokrasi ini dimaksudkan agar bekerja sesuai dengan kebutuhan untuk merespon kepentingan masyarakat agar lebih terwadahi.

“Terkait fragmentasi itu sebelumnya kan Dinas Ketahanan Pangan ini belum ada, dulu hanya ada Dinas Pertanian, tetapi cakupannya terlalu luas sehingga dibagilah menjadi dua yaitu Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan. Dengan begitu dapat mempersingkat kerja pada bidang masing-masing dan masyarakat menyesuaikan sesuai dengan urusannya juga” (wawancara dengan Kabid Distribusi dan Harga Pangan 5 mei 2022)

Dari hasil wawancara diatas maka dapat diketahui bahwa fungsi dari fragmentasi sendiri adalah pembuatan wadah lain untuk bekerja sesuai dengan fungsinya, dan mempermudah pekerjaan di bidang masing-masing. Karena awalnya hanya dibentu Dinas Pertanian yang memiliki bidang bercabang, dan bekerja pada banyak fungsi. Kemudian setelah itu dilakukan fragmentasi guna mempermudah dan mempersingkat kerja pada bidang masing-masing.

5. Kebijakan

Kebijakan ini memuat ruang lingkup pada Peraturan Bupati Jeneponto No. 26 Tahun 2019 pada Bab III pasal 3, antara lain :

- a. Besaran dana cadangan pangan;
- b. Koordinasi pelaksanaan;
- c. Mekanisme pengelolaan;
- d. Mekanisme penyaluran; dan
- e. Pelaporan.

Kebijakan ini diberlakukan untuk mengatur pengelolaan cadangan pangan di Kabupaten Jeneponto, adapun maksud dan tujuan dari kebijakan Peraturan Bupati Jeneponto No. 26 Tahun 2019 pada Bab II pasal 2, yaitu:

- (1) Pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah dimaksudkan untuk mendorong terjadinya penyediaan cadangan pangan daerah di tingkat Kabupaten dalam menghadapi keadaan darurat dan pasca bencana serta melindungi petani/produsen pangan strategis sesuai dengan potensi daerah dari gejolak penurunan harga pada waktu panen.
- (2) Pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan penyediaan pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu antar daerah;
 - b. Memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan paceklik berkepanjangan serta antisipasi kerawanan pangan pasca bencana;
 - c. Instrumen stabilitas harga pangan khususnya mengantisipasi guncangan dari pasar domestik maupun internasional; dan
 - d. Meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien terutama pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana dan paceklik berkepanjangan maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.

“kebijakan ini merupakan kebijakan dari pemerintah pusat dalam menghandle cadangan pangan di Kabupaten Jeneponto, karena pemerintah pusat itu tidak selamanya terjun langsung ke setiap daerah di satu provinsi, itu hal yang sangat susah, jadi kemudian dikembalikan kepada daerah untuk bagaimana agar kebijakan itu ada untuk daerah, maka melalui pemerintah Kabupaten Jeneponto dibuatlah kebijakan sebagaimana mestinya, yaitu Peraturan Bupati Jeneponto No. 26 Tahun 2019 tentang pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah” wawancara dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan 5 mei 2022).

Kebijakan Peraturan Bupati Jeneponto No. 26 Tahun 2019 tentang pengelolaan cadangan ini sebagai bentuk dari pengawasan dari Pemerintah Pusat/Provinsi terhadap pengelolaan cadangan pangan, karena pemerintah pusat tidak dapat melakukan pengelolaan sendiri maka itu juga dibentuk Dinas Ketahanan Pangan sebagai bagian dari pengelola yang kemudian segala bentuk kegiatan dari kebijakan ini dilaporkan kepada pemerintah pusat.

“Sejauh ini program yang kami jalankan itu sudah berjalan dengan baik, sudah dijalankan sesuai dengan standar operasional prosedur, salah satu program yang kami jalankan itu adalah kelompok wanita tani (KWT), selain itu juga ada program gabungan kelompok tani Mujur (GAPOKTAN) dengan program penanaman padi dan jahe, dan khususnya mengendalikan hama dan penyakit tanaman secara terpadu, selain itu juga ada semacam kunjungan lapangan gapoktan ke luar daerah dalam rangka meningkatkan pengetahuan anggota” wawancara dengan kapid distribusi pangan Kabupaten Jeneponto 5 mei 2022).

Program yang dijalankan oleh Dinas Ketahanan Pangan itu ada Kelompok Wanita Tani yang berada di Kecamatan masing-masing, dimana mereka mengelola pangan lokal dan berkreaitivitas sesuai dengan potensi pangan lokal yang ada. Selain itu juga ada program gabungan kelompok tani yang memiliki program penanaman pangan berupa padi dan cabe, dan lain-lainnya. Kunjungan ke beberapa daerah untuk memperluas pengetahuan anggota dalam melakukan budidaya pangan.

6. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

1. Faktor pendukung

a. Komunikasi

Komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan berjalan sebagaimana mestinya, dalam bentuk sosialisasi yang dilaksanakan di Kantor Dinas Ketahanan Pangan ataupun kunjungan langsung ke Desa dan juga interaksi dengan masyarakat. Tanpa adanya komunikasi yang terjalin maka kegiatan-kegiatan berupa program juga tidak akan berjalan.

b. Sumber daya

Sumber daya yang digunakan ada dua yaitu sumber daya manusia dan sumber daya pangan, dimana sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Jeneponto itu sangat banyak dan dapat dikatakan terpenuhi, sedangkan sumber daya pangan itu yang kurang di daerah-daerah yang panas karena faktor iklim, sedangkan di daerah pegunungan itu sumber daya pangannya bagus apalagi pangan sayur-sayuran.

c. Disposisi

Dalam melaksanakan kebijakan Peraturan Bupati Jeneponto No. 26 Tahun 2019, Dinas Ketahanan Pangan sudah berjalan sebagaimana mestinya sesuai kebijakan, baik dalam penyelenggaraan program maupun bentuk komunikasi nya.

d. Struktur Birokrasi

Para pelaksana kebijakan adalah aparaturnya dan pegawai/staf Dinas Ketahanan Pangan, dimana memiliki tugas dan fungsi pada bidangnya masing-masing, sehingga pengelolaan ini berjalan dengan baik.

2. Faktor Penghambat

a. Komunikasi

Komunikasi yang belum benar-benar merata karena tidak semua masyarakat mau dan mampu ikut serta dalam kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan sehingga banyak yang belum mengerti tentang kebijakan pengelolaan cadangan pangan.

b. Sumber daya

Sumber daya pangan menjadi kendala karena dikategorikan masih kurang di daerah gersang seperti Kecamatan Tarowang dimana pangan hanya dilakukan dua kali dalam setahun karena faktor iklim.

c. Disposisi

Belum meratanya prioritas program, yang hanya dilakukan di beberapa daerah, meskipun pembentukan organisasi di setiap daerah tetap ada tetapi yang menjadi prioritas adalah sesuai dengan hasil pangan yang memadai.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi, beberapa aparaturnya tidak sesuai antara gelar pendidikan dan bidangnya, karena hal ini dapat menjadi sebuah

kendala karena ilmu yang didapatkan dalam pendidikannya tidak mempelajari seluk beluk pangan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV, maka peneliti memberikan kesimpulan berdasarkan fokus penelitian yaitu pelaksanaan kebijakan memiliki faktor pendukung dan penghambat sehingga tidak semua kebijakan berjalan dengan baik, tetap beberapa pelaksanaan kebijakan juga berjalan dengan baik.

Adapun hasil pembahasan dari indikator yang dilaksanakan adalah :

1. Komunikasi, menjadi faktor pendukung karena terbukti melalui program yang dilaksanakan, itu merupakan hasil komunikasi yang baik, maka sebagian besar masyarakat paham akan kebijakan yang dilaksanakan.
2. Sumber Daya, sumber daya juga terkait pada dua aspek yakni sumber daya manusia sebagai faktor pendukung karena sangat memadai, sedangkan sumber daya lahan yang masih kurang disebabkan karena faktor iklim.
3. Disposisi, kesiapan menjalankan program jelas karena adanya sosialisasi dan bantuan dari pemerintah. Masyarakat yang belum mengetahui kebijakan itu karena faktor partisipasi, dimana sebagian masyarakat saja yang sering berpartisipasi dalam pelaksanaannya.
4. Struktur Birokrasi, bekerja pada bidang masing-masing yang telah ditetapkan, tetapi dari struktur nya dilihat bahwa beberapa gelar aparatur yang diperoleh tidak sesuai dengan bidangnya.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini, penulis menemukan beberapa hal yang perlu dibenahi dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto dan masyarakat yaitu sebagai berikut :

1. Lebih memprioritaskan lagi program yang dilaksanakan, khususnya memberikan solusi bagi daerah yang kekeringan.
2. Meskipun dengan gelar yang baik, tetapi aparatur harus bekerja pada bidangnya masing-masing.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Syani. 2013. *Sosiologi Kelompok dan Masalah Sosial*. Jakarta : Fajar Agung.
- Agostiono. 2010. *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*. 154.
- Akib, Haedar. 2012. *Implementasi Kebijakan : Apa, Mengapa dan Bagaimana*. Vol1(1).1 -11.
- Aninda, Aruni Rizka. 2018. *Kajian Pemanfaatan Sumberdaya Pangan Lokal Terhadap Pangan Rumah Tangga Kabupaten Kulon Progo*. 1-10.
- Arifin Tahir, 2014, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung : Alvabeta
- Awaluddin. Hendra. 2018. *Fungsi Manajemen Dalam Pengadaan Infrastruktur Pertanian Masyarakat Di Desa Watatu Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala*. Vol 2(1) : 1-12. jurnal.untad.ac.id.
- Badan Ketahanan Pangan dan World Food Program. 2009. *Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia (A Food Security and Vulnerability Atlas of Indonesia 2009)*.
- Bs, Sarneni. 2019. *Strategi Pemerintah Dalam Pengembangan Sektor Pertanian Di Kabupaten Jenepono*. 1-85.
- Cahyadi, Untung. 2014. *Jaringan Jalan Pada Kawasan Startegis Produksi Pangan*.
- Dirhamsyah, Tedy. 2016. *Ketahanan Pangan Kemandirian Pangan dan Kesejahteraan Masyarakat Daerah Rawan Pangan Di Jawa*. Vol 2(1). 159-173.
- Dr. Rachmat, Muchjidin. Dkk. 2010. *Kajian Sistem Cadangan Pangan Masyarakat Pedesaan Untuk Mengurangi 25% Resiko Kerawanan Pangan*.
- Firdaus. Dwi, Oktisari. 2018. *Birokrasi Dan Implementasi Program*. Vol 3(2) : 1-11.
- Ghugunk, Ali. 2020. *Jenepono Berpotensi Jadi Lumbung Energi dan Pangan Sulsel*.
- Halik, Abdul. 2008. *Ketahanan Pangan Dalam Wilayah Pedesaan Dan Perkotaan Hubungannya Dengan Konsumsi Pangan Masyarakat*. 1-49
- Hardiati. Hamdie, Nikhwari A. Juniady.
- Hermanto. 2013. *Pengembangan Cadangan Pangan Nasional Dalam Rangka Kemandirian Pangan*. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, Vol. 31(1) : 1 – 13.
- Karimeng, E.A. Manaf, Murshal. Salim, agus. 2019. *Analisis Komoditi Unggulan Pada Pengembangan Wilayah Di Kabupaten Jenepono*. 1(2) : 38-42.
- Kurnia, Asyifa Widhi. Dkk. 2020. *Implementasi Kebijakan Cadangan Pangan Nasional Dalam Kondisi Keadaan Darurat Di Badan Ketahanan Pangan Guna Mendukung Pertahanan Negara*. *Jurnal Manajemen Pertahanan*. 6(1) : 73-99.
- Lestari, Sri. Ayu, Ni Made. 2020. *Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Di Desa Medahan, Blahbatuh, Gianyar*. Vol 8(4). 667-677.
- Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara Jakarta, 1991, Hal. 21.

- Peraturan Bupati Jenepono Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- Purwaningsih, Yunastiti. 2008. Ketahanan Pangan : Situasi, Permasalahan, Kebijakan, Dan Pemberdayaan Masyarakat. Vol 9(1). 1-27.
- Rachman, Handewy P.S. Purwoto, Adreng. Hardono, Gatoet S. 2005. Kebijakan Pengelolaan Cadangan Pangan Pada Era Otonomi Daerah Dan Perum Bulog. Forum Penelitian Agro Ekonomi. Vol. 23 No. 2, Desember 2005 : 73 – 83.
- Rahmi, Hasanatul, Jumiati. 2020. Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Pesisir Selatan. *Studi kasus pengelolaan cadangan pangan masyarakat*. 2:1. 12-23.
- Ramadhani, Tri Bayu. 2018. Kebijakan Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat Dalam Mengelola Cadangan Pangan Daerah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. *Jurnal Ilmiah*. 1-22.
- Peraturan Bupati Jenepono Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Daerah Nunukan Kalimantan Utara. 2017. Cadangan Pangan.
- Salsabilah, Sarah. 2019. Analisis Pengelolaan Ketahanan Pangan Masyarakat Tani Menurut Manajemen Risiko Syariah Studi Di Desa Mee Tanjong Usi Kabupaten Pidie. 1-126.
- Santi. 2015. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Penerima Raskin (Studi di Kelurahan Tompokersan, Kabupaten Lumajang) (Skripsi yang tidak dipublikasikan). Universitas Airlangga, Surabaya.
- Soekanto, Soejono. 2012 Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Suharyanto, Heri. 2011. Ketahanan Pangan. *Jurnal Sosial Humaniora*. Vol. 4. 1-194.
- Swastika. Dewi Ketut Sadra. 2011. Membangun Kemandirian Dan Kedaulatan Pangan Untuk Mengentaskan Petani Dari Kemiskinan. Volume 4 Nomor 2. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
- Taufik dan Isril. 2013. Implementasi Peraturan Daerah Badan. Permusyawaratan Desa. *Jurnal Kebijakan Publik*, Volume 4, Nomor 2.
- Terry, George R. 2011. Prinsip-Prinsip Manajemen. Jakarta : Penerbit Buku Ak Torang, Syamsir. 2013. Organisasi dan Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & perubahan Organisasi, Alfabeta.
- Widodo, Joko. 2009. Analisis Kebijakan Publik, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 97.
- Yamin. M. N. 2016. Implementasi Kebijakan Perizinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat Pada Kepolisian Resort Kota Kendari. Volume 1 Nomor 1.
- https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Jenepono.

RIWAYAT HIDUP



Dian Ekawati, lahir di Bonto Rappo pada tanggal 2 November 2000, anak ke 2 dari 3 bersaudara dari pasangan Agus Salim dan Sumarni. Penulis mulai masuk ke jenjang pendidikan Sekolah Dasar pada Tahun 2006-2012 di SDN No. 8 Bontorappo. Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Bissappu pada Tahun 2012-2015. Pada Tahun 2015 masuk ke SMA Negeri 2 Bantaeng dan Tamat pada Tahun 2018, dan penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar dengan Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik strata 1 (S1). Pada Tahun 2022 penulis menyelesaikan studi dengan karya ilmiah yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Pengelolaan Cadangan Pangan Dalam Memenuhi Kebutuhan Pangan Masyarakat Di Kabupaten Jeneponto”**.